

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nuklir sebagai kekuatan militer Korea Utara dianggap sebagai ancaman oleh AS. Dalam kepemimpinan Presiden George W Bush yang terkenal keras, kebijakan yang diambil Bush lebih mengedepankan militer. Bush menyatakan jika Korea Utara merupakan *Axis of Evil*. Kebijakan Bush mengedepankan (*Pre-emptive Strike*), Presiden Bush pun juga berprinsip tidak akan menunggu datangnya ancaman itu sendiri. Dalam menangani nuklir Korea Utara, AS memberikan sanksi dengan menanggukhan pengiriman bahan bakar ke Korut. (Wirengjurit, 2002) Sedangkan kepemimpinan Presiden Barack Obama, kebijakan yang diambil mengedepankan jalur *soft*/diplomasi. Pemerintahan Obama melakukan pendekatan dengan dialog bersama pemerintahan Korea Utara dalam membahas pengembangan nuklir Korea Utara. AS menerapkan kebijakan luar negeri *Strategic Patience Approach* terhadap Korea Utara. *Strategic Patience* merupakan sebuah kebijakan yang menyatakan jika Amerika Serikat bisa untuk menunggu Korea Utara dalam membuat keputusan denuklirisasinya, selaras dengan kenyataan politik terhadap kasus tenggelamnya kapal Korea Utara serta penembakan Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. (Rantung, 2017)

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017, tentunya membawa suasana baru bagi dunia internasional, khususnya Korea Utara. Hal itu dikarenakan uji coba nuklir atau rudal memiliki dampak serius. Adanya korban dari insiden tersebut, seperti Korea Selatan yang merupakan negara tetangga Korea Utara dan sekutu Amerika Serikat. Selain itu, jika Korea Utara berhasil mengembangkan kekuatan nuklirnya, hal ini jelas dapat mengancam eksistensi Korea Selatan. Dan Korea Utara juga bisa sewaktu-waktu kembali menyerang Korea Selatan seperti pada tahun 1950. Dan dampak bagi Amerika

Serikat sendiri ialah perkembangan dan aktivitas nuklir Korea Utara ini dikhawatirkan dapat mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur lainnya. Pada bulan April hubungan antara kedua negara menjadi semakin panas, khususnya tanggal 8 April 2017 militer Amerika Serikat menurunkan unit barisan tempur Angkatan Laut untuk pindah ke Semenanjung Korea. Kemudian pada 11 April 2017 Korea Utara menyatakan akan memperjuangkan negaranya dengan kekuatan nuklirnya. (bbc.com, 2017)

Menanggapi hal ini, Presiden AS Donald Trump melakukan peninjauan terhadap kebijakan Korea Utara. Sebelumnya, Amerika Serikat terus mengingatkan Kim Jong Un akan dampak dari uji coba senjata nuklir tersebut bagi negara tetangganya seperti Korea Selatan dan Jepang. Tentu saja, langkah militer Amerika Serikat pada Korea Utara adalah langkah salah mengingat Korea Selatan dan Jepang adalah sekutu bagi Amerika Serikat. Donald Trump pun akhirnya memakai strategi perang urat syaraf dan gertakan sebagai siasatnya dalam bernegosiasi dengan Kim Jong Un. Hal ini bertujuan untuk menghentikan Pyongyang dalam uji coba nuklirnya agar tidak mendapat tekanan dari negara tetangga Korea Utara. Menteri Keuangan AS, Steven Munchin juga sedang membuat susunan proposal yang baru untuk pemberian hukuman terhadap negara-negara ketiga yang melakukan bisnis bersama Korea Utara dan memotong akses dagangnya ke pasar-pasar AS. Namun, cara ini dianggap tidak efektif karena dapat memprovokasi negara-negara lain walaupun cara ini sangat proporsional jika diterapkan untuk Korea Utara. Terpaksa cara terbaik yang dilakukan ialah dengan diplomasi dan dialog untuk mengatasi masalah ini serta mencegah konflik militer yang nantinya bisa berakibat fatal. (Nilsson-Wright, 2017)

Ketegangan pun terus meningkat sepanjang tahun dikarenakan perkembangan program nuklir dan rudal Korea Utara yang masih saja berlanjut dan Korea Utara menghiraukan tekanan-tekanan dari dunia. Dalam mengatasi masalah ini, Korea Utara harus berpikir dengan hati-hati untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal karena akan berdampak serius pada negaranya. Salah satunya adalah peneakan sanksi ekonomi, jika itu terjadi negara akan mengalami krisis ekonomi dan ketidakstabilan di negara tersebut. Pemerintahan Donald Trump pun

berupaya untuk mencari solusi diplomatik apa saja yang bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga sedang membuat sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Korea Utara. Berikut sanksi baru tersebut (bbc.com, Uji rudal Korea Utara, PBB memberlakukan sanksi baru, 2017): pembatasan Impor bensin hanya 500.000 barel per tahun dan minyak mentah hanya 4 juta barel per tahun; semua warga negara Korea Utara yang bekerja di luar negeri harus kembali ke negara mereka dan diberi periode 24 bulan berdasarkan proposal resolusi; larangan Korea Utara mengirimkan barang-barangnya seperti mesin dan peralatan listrik yang diperlukan untuk dapat merekrut Korea Utara.

Selain tiga hal ini, Amerika Serikat dan PBB menambahkan sanksi kepada Korea Utara dalam pembatasan impor minyak dan juga pelarangan untuk mengekspor tekstil sebagai upaya dalam pengosongan bahan bakar dan pemasukan Korea Utara untuk pembuatan dan pengembangan program senjatanya. Akan tetapi, masalah nuklir di Korea Utara secara bertahap menjadi semakin serius. Untuk beberapa waktu, Korea Utara memiliki beberapa uji coba nuklir dan terus mengembangkan berbagai kemampuan rudal jarak menengah hingga jangka panjang. Saat ini, Korea Utara secara resmi mengumumkan kebijakan Byungjin, yang bertujuan mengembangkan senjata nuklir dan pembangunan ekonomi. Korea Utara memiliki ambisi besar untuk mengembangkan kemampuan nuklir canggih. Setelah, Korea Utara mengeluarkan kebijakan Byungjin, Amerika Serikat kembali memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.

Walaupun Korea Utara telah menerima sanksi ekonomi, Korea Utara tetap melakukan proliferasi nuklir dengan pengembangan senjata nuklirnya. Sanksi ekonomi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi Korea Utara. Dengan kata lain, sanksi ekonomi tidak memiliki dampak yang signifikan sebagai solusi untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Program denuklirisasi Korea Utara adalah solusi untuk menghentikan pengembangan nuklir. Hal ini memang banyak dikritik oleh komunitas internasional karena mengancam keberadaannya, selain denuklirisasi sebagai simbol perdamaian dunia tanpa senjata, denuklirisasi ini harus dilakukan sebagaimana mestinya, dengan kebijakan yang akan dibuat nanti, harus disepakati bersama dan menahan keegoisan seorang pemimpin untuk pengembangan nuklir. Setelah dilakukan pertemuan di Singapura ada 4

kesepakatan yang dicapai Donald Trump dan Kim Jong Un (Efendi, 2018): (1) Amerika Serikat dan Korea Utara akan membentuk hubungan baru AS-Korut berdasarkan keinginan rakyat dari kedua negara yang menginginkan adanya perdamaian dan kesejahteraan. (2) Amerika Serikat dan Korea Utara juga akan bekerjasama dalam membangun perdamaian yang stabil dan panjang di Semenanjung Korea sendiri. (3) Dalam Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018 akan memastikan kembali, denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea dan komitmen Korea Utara dalam menuju hal tersebut. (4) Amerika Serikat dan Korea Utara akan berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan tahanan perang dan jenazah tentara yang hilang dan repatriasi bagi jenazah yang sudah diidentifikasi.

Dengan adanya kesepakatan ini, membuktikan jika hubungan bilateral Korea Utara dan Amerika membaik serta dapat menciptakan perdamaian, dan kesejahteraan serta mendorong keamanan di Semenanjung Korea. Dari hubungan ini Korea Utara berharap sanksi ekonomi internasional benar-benar bisa dihapuskan. Namun di satu sisi, Amerika yang menginginkan Korea Utara untuk berhenti menggunakan nuklir tidak disetujui oleh Korea Utara. Hal ini juga menyebabkan gagalnya pertemuan kedua mereka di Hanoi, Vietnam pasca 8 bulan pertemuan pertama. Dalam pemberitaan yang beredar, hubungan mereka memanas kembali. Pertemuan puncak Februari lalu di Vietnam antara Kim dan Trump itu gagal karena adanya ketidaksepakatan mengenai cara menyamakan laju pelonggaran sanksi-sanksi dengan langkah-langkah untuk melucuti program nuklir Korea Utara. Dimana, Korut meminta AS mencabut sanksi terlebih dahulu sebelum melakukan denuklirisasi, sedangkan AS meminta Korut untuk melucuti persenjataan nuklirnya sebelum sanksi dicabut. Hal ini yang menyebabkan gagalnya pertemuan kedua tersebut. Keegoisan dari kedua pemimpin sama-sama bersikeras dengan kemauan masing-masing. Gagalnya negosiasi antara kedua negara sehingga tidak tercapainya kesepakatan. Penjelasan Trump tentang hal ini ialah tidak mungkin mencabut sanksi itu sepenuhnya karena hal tersebut merupakan alat tawar menawar yang sangat signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan respon Amerika Serikat terhadap Kebijakan Nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Donald Trump periode 2017 sampai 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Korea Utara dan nuklirnya ternyata memberikan efek yang serius untuk keamanan di dunia. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur sendiri merasa terancam akan uji coba tersebut. Ketegangan yang terus meningkat antara Presiden Trump dan Kim menandakan jika kasus ini harus segera mendapatkan titik temu. Pengembangan nuklir Korea Utara tersebut harus segera dihentikan agar tidak membahayakan negara sekitar. Berpijak dari pendahuluan yang telah dijabarkan diatas, maka dari itu penulis akan membahas lebih lanjut dengan perumusan masalah, yaitu: **“Bagaimana Kebijakan Donald Trump dalam Merespons Nuklir Korea Utara periode 2017-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis hendak mencapai tujuan dalam penulisan ini guna mengetahui bagaimana kebijakan donald trump dalam merespons nuklir Korea Utara periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat - manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan pada penelitian dimasa yang akan datang, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian. Hasil dari peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kebijakan donald trump dalam merespons nuklir korea utara 2017-2019
- b. Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengeksplorasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Peneltian yang sudah dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk menemukan perbedaan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep dalam ilmu hubungan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memahami alur pemikiran penelitian, maka penulis membagi penelitian ini dalam bagian yang terdiri dari bab dan subbab. Sistematika penulisan pun dibagi dalam V bab penelitian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan penelitian – penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV DINAMIKA KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA DAN RESPON AMERIKA SERIKAT SEBELUM MASA PEMERINTAAHAN DONALD TRUMP

Bab ini menjelaskan program pengembangan nuklir beserta uji coba nuklir Korea Utara dan bagaimana kebijakan Amerika Serikat dalam merespons nuklir Korea Utara sebelum masa pemerintahan Donald Trump.

BAB V KEBIJAKAN KEAMANAN NUKLIR AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP PERIODE 2017-2019

Bab ini menjelaskan tentang program denuklirisasi sebagai kebijakan Trump terhadap proliferasi nuklir Korea Utara. Selain itu, bab ini juga membahas tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat lainnya untuk mendukung program denuklirisasi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian beserta saran dari penulis.